

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia membagi kewenangan pemerintah atas dasar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang RI Tahun 1945 dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2001 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan wilayah administratif yang terbagi menjadi wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut, penjelasan pada peraturan yang sama, yaitu Pasal 22 Undang-Undang RI Tahun 1999 telah menempatkan daerah provinsi sebagai daerah otonom.² Dengan begitu, sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah otonom, gubernur memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan, termasuk penataan lembaga dan kepegawaian, hubungan politik, pelayanan publik serta pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh urusan pemerintahan.³

Pemerintah provinsi di Indonesia tergabung dalam 6 wilayah unit kerja berdasarkan peta kepulauan negara dengan Jawa sebagai pusat ibukota dan juga pusat pemerintahan, di Provinsi DKI Jakarta, serta termasuk di dalamnya daerah keistimewaan, DI Yogyakarta. Bukan lagi isu belaka jika Jawa dijuluki sebagai pusat kegiatan politik dan administrasi negara. Selain itu, destinasi wisata, pusat perbelanjaan, pendidikan sampai fasilitas umum juga banyak dijumpai di Jawa.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, (Jakarta Pusat: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara), dalam <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 23 November 2023, pukul 08.45, hlm. 12 – 13

³ Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah*, (Makassar: De La Macca, 2018), dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/>, diakses 23 November 2023, pukul 09.30, hlm. 56

Di sektor publikasi, media menyebut Jawa sebagai pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, pembangunan di segala aspek, perkembangan industri bisnis, kemajuan teknologi, pemenuhan fasilitas umum, sarana dan prasarana serta menjadikan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator penilaian ekonomi suatu daerah dan bahan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah tersebut, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto
Kepulauan Indonesia

dalam milyar rupiah

Wilayah Kepulauan	Distribusi PDRB	%	Rank	Provinsi
Sumatera	248.725,74	2,10	2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau
Jawa	1.158.104,08	9,78	1	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten
Bali dan Nusa Tenggara	108.530,26	0,92	5	Bali, NTB, NTT
Kalimantan	194.499,25	1,64	3	Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
Sulawesi	132.803,18	1,12	4	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat
Maluku dan Papua	77.248,37	0,65	6	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik⁴, data diolah

⁴ Badan Pusat Statistik, "Produk Domestik Regional Bruto", dalam <https://www.bps.go.id/>, diakses 26 November 2023, pukul 14.19

Tabel 1.1 menyatakan Jawa sebagai wilayah kepulauan dengan tingkat kontribusi PDRB tertinggi di Indonesia sebesar 9,78% untuk 6 daerah provinsi. Disusul oleh Kepulauan Sumatera di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 2,10% untuk 8 daerah provinsi dan 2 daerah kepulauan serta di urutan ketiga untuk Kepulauan Kalimantan dengan 5 daerah provinsi yang berhasil mencatat kontribusi sebesar 1,64%.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi di Indonesia

dalam milyar rupiah

Wilayah Kepulauan	Provinsi	Distribusi PDRB	%	Rank
Sumatera	Aceh	140.947,64	1,19	16
	Sumatera Utara	573.528,77	4,84	5
	Sumatera Barat	182.629,54	1,54	12
	Riau	529.532,98	4,47	6
	Jambi	161.717,68	1,37	13
	Sumatera Selatan	343.483,65	2,90	9
	Bengkulu	49.916,06	0,42	21
	Lampung	257.534,19	2,18	10
	Kepulauan Bangka Belitung	57.803,20	0,49	20
Kepulauan Riau	190.163,70	1,61	11	
Jawa	DKI Jakarta	1.953.455,85	16,50	1
	Jawa Barat	1.589.984,93	13,43	3
	Jawa Tengah	1.050.322,13	8,87	4
	DI Yogyakarta	112.898,32	0,95	17
	Jawa Timur	1.757.821,43	14,85	2
	Banten	484.141,83	4,09	8
Kalimantan	Kalimantan Barat	148.368,94	1,25	14
	Kalimantan Tengah	109.094,72	0,92	18
	Kalimantan Selatan	142.339,28	1,20	15
	Kalimantan Timur	506.158,91	4,28	7
	Kalimantan Utara	66.534,39	0,56	19

Sumber: Badan Pusat Statistik⁵, data diolah

⁵ Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto”, dalam <https://www.bps.go.id/>, diakses 26 November 2023, pukul 14.19

Kontribusi PDRB di Kepulauan Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang sebelumnya mencatat kontribusi tertinggi telah dikomparasikan pada tabel 1.2 dan menunjukkan bahwa posisi teratas ditempati oleh 4 daerah di Kepulauan Jawa, yaitu DKI Jakarta (16,5%), Jawa Timur (14,85%), Jawa Barat (13,43%), Jawa Tengah (8,87%) dan 1 daerah di posisi 8, yaitu Banten (4,09%). Lebih lanjut, daerah di Kepulauan Sumatera menempati posisi 5 dan 6 untuk Sumatera Utara (4,84%) dan Riau (4,47%) serta posisi 9 dan 10 untuk Sumatera Selatan (2,90%) dan Lampung (2,18%). Sementara itu, di Kepulauan Kalimantan, hanya ada 1 daerah yang termasuk, yaitu Kalimantan Timur (4,28%) di posisi 7. Komparasi kontribusi PDRB tersebut menyimpulkan bahwa Jawa merupakan penyumbang PDRB terbesar di Indonesia dan membuktikan bahwa wilayahnya merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

Dibalik keunggulan pulau padat penduduk ini, ternyata sebagian opini publik berseberang dengan apa yang diberitakan oleh media. Masyarakat selalu menyorot bagaimana pemerintah menyerukan pembangunan berkelanjutan, tapi fakta di lapangan masih banyak yang belum maksimal. Tidak bisa dipukul rata, tapi kondisi ini berlaku untuk daerah terpencil, terpelosok, daerah perbatasan, atau daerah yang menurut pemerintah akan memakan waktu untuk sampai ke sana. Ambil contoh, perbaikan jalan yang belum ada tindakan hingga sulitnya akses ke pusat kota atau penundaan pembangunan sekolah yang belum layak. Itu sebabnya, sampai saat ini pun banyak masyarakat yang beranggapan bahwa, “dana pemerintah tidak pernah sampai ke rakyat” dan persoalan publik tentang “bagaimana pemerintah mengelola dana negara?” selalu dipertanyakan.

Kewenangan daerah otonom mengharuskan pemerintah provinsi untuk bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah di wilayah masing-masing. Jika masyarakat merasa tidak puas, merasa bahwa pemenuhan kepentingan publik belum terlaksana dengan baik atau merasa tidak adanya transparansi pemerintah dalam mengelola dana negara, maka kinerja keuangan daerah belum bisa dikatakan optimal, sementara pengelolaan keuangan daerah itu sendiri didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 1.3
Realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi di Wilayah Jawa
Periode 2013 – 2022

dalam milyar rupiah

Pemprov	Thn.	Pendapatan Daerah			Belanja Daerah		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
DKI Jakarta	2022	77.451,27	67.290,48	87	76.840,31	64.865,12	84
	2021	72.187,51	65.567,01	91	72.967,01	61.619,04	84
	2020	82.195,99	55.887,00	68	79.610,44	52.088,13	65
	2019	74.776,75	62.300,68	83	80.902,09	64.938,36	80
	2018	66.029,98	61.235,82	93	71.169,64	61.410,12	86
	2017	62.466,13	64.823,89	104	63.612,30	51.066,08	80
	2016	59.004,78	53.784,71	91	59.945,52	47.128,81	79
	2015	60.442,74	44.209,24	73	63.650,11	43.031,32	68
	2014	64.715,74	43.824,30	68	64.882,75	37.799,66	58
	2013	41.525,34	39.517,54	95	45.576,33	38.301,50	84
Banten	2022	10.645,88	11.205,65	105	11.223,18	11.278,68	100
	2021	11.633,13	11.623,31	100	15.948,25	11.660,63	73
	2020	12.609,36	10.334,12	82	13.214,39	9.879,31	75
	2019	11.831,98	11.201,87	95	12.154,53	11.324,59	93
	2018	10.365,62	10.320,37	100	11.362,38	9.992,82	88
	2017	9.790,92	9.706,07	99	10.349,99	9.512,81	92
	2016	8.005,29	8.656,40	108	8.811,08	8.925,81	101
	2015	7.644,63	7.328,22	96	8.947,63	8.084,14	90
	2014	6.878,07	7.068,43	103	7.349,40	6.192,16	84
	2013	5.718,70	6.230,23	109	6.052,00	5.295,14	87
Jawa Barat	2022	31.540,87	33.232,27	105	31.525,70	32.644,21	104
	2021	41.472,00	36.991,87	89	44.615,07	37.470,91	84
	2020	41.583,15	34.504,28	83	45.995,26	38.127,53	83
	2019	34.882,31	36.037,89	103	37.055,51	35.833,09	97
	2018	31.961,20	33.919,20	106	33.961,20	33.333,82	98
	2017	30.540,90	32.163,96	105	32.429,03	32.706,75	101

Pemprov	Thn.	Pendapatan Daerah			Belanja Daerah		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	2016	26.806,86	27.694,04	103	28.603,28	27.621,96	97
	2015	23.914,49	24.009,98	100	24.753,76	24.417,61	99
	2014	19.907,97	22.310,95	112	21.194,37	20.797,99	98
	2013	16.651,60	19.237,61	116	17.516,65	18.396,75	105
Jawa Tengah	2022	24.303,74	24.167,94	99	24.589,87	23.950,24	97
	2021	26.840,83	26.633,00	99	27.190,83	25.843,80	95
	2020	28.301,08	25.393,74	90	29.026,57	25.651,74	88
	2019	25.965,58	25.859,78	100	26.632,34	26.151,06	98
	2018	24.413,66	24.702,32	101	24.993,66	24.478,63	98
	2017	23.467,52	23.703,17	101	23.363,52	22.884,71	98
	2016	22.026,20	19.632,58	89	22.426,20	19.354,37	86
	2015	17.097,69	16.828,15	98	17.337,69	17.820,76	103
	2014	13.737,16	15.157,46	110	13.997,16	15.086,07	108
	2013	11.930,24	13.343,36	112	12.730,24	12.724,78	100
DIY	2022	5.364,61	5.531,19	103	5.761,35	5.449,94	95
	2021	5.727,77	5.703,10	100	6.091,57	5.530,17	91
	2020	6.130,18	5.611,51	92	6.494,71	5.433,18	84
	2019	5.663,78	5.699,36	101	5.968,67	5.544,65	93
	2018	5.182,97	5.443,18	105	5.544,33	5.296,40	96
	2017	4.988,38	5.085,24	102	5.200,39	4.920,63	95
	2016	3.921,07	3.899,19	99	4.189,99	3.847,96	92
	2015	3.424,28	3.400,01	99	3.696,26	3.496,43	95
	2014	3.100,20	3.139,87	101	3.330,07	2.981,07	90
	2013	2.286,86	2.583,06	113	2.454,92	2.509,64	102
Jawa Timur	2022	27.642,17	31.904,78	115	29.454,86	31.502,99	107
	2021	31.210,46	34.280,71	110	33.008,20	33.852,94	103
	2020	33.028,70	31.631,02	96	35.196,61	32.286,76	92
	2019	31.927,10	33.455,21	105	33.519,93	33.967,11	101
	2018	29.024,31	31.939,19	110	30.762,06	30.662,09	100
	2017	27.932,99	29.864,03	107	28.247,22	28.878,13	102
	2016	22.663,14	24.962,12	110	23.050,80	23.859,95	104
	2015	22.863,54	22.228,45	97	23.720,92	22.946,31	97
	2014	17.393,78	20.772,48	119	17.811,14	20.006,32	112
	2013	14.996,87	17.411,31	116	15.356,56	16.738,66	109

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI⁶, data diolah

Realisasi APBD pemerintah provinsi di Wilayah Jawa pada tabel 1.3 terlihat baik dengan persentase pendapatan daerah berkisar antara 80% sampai dengan di atas 100% dengan Jawa Timur yang melaporkan persentase tertinggi

⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/>, diakses 23 November 2023, pukul 11.20

yang disusul oleh Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Sementara itu, hanya DKI Jakarta yang melaporkan persentase di bawah 80% dengan 68% tahun 2014 dan 2020 serta 73% di tahun 2015. Lebih lanjut, realisasi belanja daerah ternyata lebih rendah dari realisasi pendapatan daerah dengan persentase antara 65% sampai dengan di atas 100% dan Jawa Timur menjadi daerah paling banyak merealisasikan belanja di atas 100% sepanjang 10 tahun terakhir, kecuali tahun 2015 dan 2020. Sementara itu, daerah dengan realisasi belanja terendah adalah DKI Jakarta di tahun 2014 dengan 58%.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini disusun dengan maksud untuk membantu mengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang selanjutnya akan dialokasikan kepada pemerintah daerah di bawahnya dan seterusnya sampai dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan publik dan membiayai kebutuhan daerah terkait, mencakup rancangan ekonomi, prioritas pembangunan serta rencana kerja yang terukur pendanaanya.⁷ Di akhir periode, sebagai bentuk pertanggungjawaban wakil pemerintah pusat, entitas pelaporan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menunjukkan bahwa sumber daya keuangan telah direalisasi sesuai anggaran.⁸

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan APBD akan diukur dan dinilai secara keseluruhan baik dari segi *finansial* maupun tidak. Jika persoalan publik menitikberatkan pada isu alokasi dana dan pengelolaannya,

⁷ Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm. 42 – 43

⁸ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Gowa: Berkah Utami, 2019), dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>, diakses 24 November 2023, pukul 10.30, hlm. 130

maka evaluasi pemerintah daerah akan fokus pada bagaimana dan seperti apa kinerja keuangan di daerah mereka. Dengan demikian, komponen APBD dalam laporan realisasi anggaran akan menjadi sorotan, seperti sumber penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, baik pajak, retribusi atau kekayaan daerah itu sendiri, transfer dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, misalnya hibah atau dana darurat.⁹ Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah dalam membelanjakan dana mereka untuk tujuan operasi maupun pengadaan modal juga perlu ditinjau kesesuaiannya dengan anggaran.¹⁰

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola APBD merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Kewenangannya dalam menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai seluruh urusan pemerintahan merupakan kemampuan daerah untuk meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pusat. Kemampuan tersebut akan membentuk hubungan keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹¹ Dengan begitu, evaluasi kinerja keuangan daerah akan diukur dan dinilai berdasarkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah itu sendiri.¹²

Evaluasi kemandirian keuangan daerah mendasari fakta bahwa program kerja, sasaran hingga tujuan pemerintah daerah bukan sembarang seruan belaka. Di samping memanfaatkan bantuan dana yang disediakan pusat, pemerintah

⁹ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik...*, hlm. 274 – 275

¹⁰ Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani dan Adhi Alfian, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 62

¹¹ Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara...*, hlm. 32

¹² Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah...*, hlm. 209

juga harus mengetahui bagaimana potensi daerah dapat digali dan dikonversi menjadi sumber pendapatan daerah. Dengan begitu, pertanyaan masyarakat dan isu yang beredar tentang pembangunan berkelanjutan serta pemerataan fasilitas, sarana dan prasarana benar-benar akan terealisasi secara berkala. Tentunya, hal ini tidak lepas dari kontribusi masyarakat dengan patuh dalam membayar pajak dan retribusi daerah untuk membantu mewujudkan program-program tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan dimaksudkan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, memastikan tercapainya tujuan organisasi, menunjukkan uang publik telah digunakan dengan ekonomis, efektif dan efisien, bentuk tanggung jawab daerah kepada pusat serta perbaikan sasaran dan program kerja di masa depan.¹³ Pentingnya penerimaan daerah sebagai indikator pengoptimalan kinerja keuangan mengidentifikasi pendapatan daerah sebagai faktor yang mempengaruhi, terutama pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Jika kinerja keuangan daerah diwakili oleh evaluasi tingkat kemandirian daerah dalam membiayai urusan pemerintah daerah tersebut, maka belanja daerah turut terlibat sebagai faktor yang mempengaruhi, terutama belanja modal yang memang ditujukan untuk kepentingan publik, berupa aset tetap seperti jalan, halte, jembatan, gedung dan fasilitas umum lainnya.¹⁴

Namun, perlu digarisbawahi bahwa penetapan APBD di setiap daerah pasti berbeda, berikut dengan pengelolaan keuangan yang juga berbeda. Hal ini sejalan dengan perbedaan kondisi *finansial* dan *non finansial* di setiap daerah,

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 151 – 152

¹⁴ Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah...*, hlm. 273 – 275

perbedaan kebutuhan dan prioritas serta isu yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kinerja keuangan daerah juga berbeda, bisa lebih baik, sama saja atau bahkan lebih buruk. Namun, hal yang pasti adalah setiap daerah selalu berupaya memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah terutama pendapatan dan belanja daerah untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumitro dengan membandingkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, dimana rasio kemandirian pemerintah kota lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Hal ini berarti bahwa pemerintah kota dianggap lebih mandiri dalam membiayai seluruh operasional pemerintahannya sendiri dibandingkan dengan pemerintah kabupaten di Jawa Timur. Perbedaan kemandirian daerah juga mengindikasikan adanya perbedaan ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten dianggap lebih bergantung dalam menggunakan dana pusat dibandingkan dengan pemerintah kota di Jawa Timur.¹⁵

Sementara itu, penelitian dari Amin Insani, Sri Rahayu dan Misni Erwati yang menguji pengaruh faktor kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi dengan variabel yang sama, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan, tetapi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

¹⁵ Sumitro, "Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Timur", *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol. 4 No. 10 (2020), dalam <http://www.e-jurnalmitramanajemen.com>, diakses 13 Desember 2023, pukul 21.00, hlm. 1481

keuangan daerah. Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat akan menurunkan tingkat kemandirian daerah dan berakibat pada penurunan kinerja keuangan daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah wajib untuk memperbaiki kinerja keuangan daerahnya dengan terus menggali dan memanfaatkan potensi daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pusat, sehingga daerah dapat mencapai kinerja yang baik dan semakin baik.¹⁶

Berangkat dari asumsi tersebut, peneliti tertarik melakukan komparasi kinerja keuangan daerah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah provinsi dalam menggunakan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan mencari sumber kekayaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah serta berdasarkan pada aspek yang dipersoalkan publik kepada pemangku kepentingan, yaitu alokasi dana dan penggunaannya. Sehingga, dilakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah provinsi di Wilayah Jawa dan bagaimana faktor tersebut akan mempengaruhi. Dengan begitu, judul penelitian yang diangkat adalah **“Komparasi Kinerja Keuangan Daerah dan Faktor yang Mempengaruhi: Studi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Wilayah Jawa”**

¹⁶ Amin Insani, Sri Rahayu dan Misni Erwati, “Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1 (2023), dalam <https://akurasi.unram.ac.id/>, diakses 13 Desember 2023, pukul 19.30, hlm. 122 – 123

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah menunjukkan bahwa tingkat realisasi APBD pemerintah provinsi di Wilayah Jawa mencatat persentase yang tinggi dengan tingkat kontribusi PDRB sebagai penyumbang terbesar di Indonesia. Dibalik itu, persoalan publik yang mengisukan dana negara tidak sampai ke masyarakat mengharuskan pemerintah menilai bagaimana kinerja keuangan daerah dalam mengalokasikan dana mereka, di samping mengelola bantuan perimbangan dari pusat sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah. Perbedaan penetapan APBD mendasari dilakukannya komparasi kinerja keuangan pemerintah provinsi di wilayah Jawa serta menguji faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut berdasarkan analisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

C. Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan dengan mengacu pada beragam isu/masalah yang ada di lapangan, yang oleh peneliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dengan maksud untuk dijawab melalui proses penelitian. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah antar pemerintah provinsi di Wilayah Jawa?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa?
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa?

4. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa?
5. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun pada rumusan masalah dan membuktikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah antar pemerintah provinsi di Wilayah Jawa.
2. Menguji pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa.
3. Menguji pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa.
4. Menguji pengaruh signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa.
5. Menguji pengaruh signifikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Jawa.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh pada penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak lain, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat sebagai pengembangan teori akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah dan faktor yang mempengaruhi dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.
2. Secara praktis, penelitian dapat dimanfaatkan pembaca, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah dapat menimbang informasi dari hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, upaya pencapaian program kerja, penetapan kebijakan di masa depan serta bentuk pertanggungjawaban pemenuhan kebutuhan publik atas dasar pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.
 - b. *Stakeholders* dapat menggunakan informasi dalam penelitian ini sebagai bahan penilaian, pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan APBD untuk kepentingan publik secara merata di wilayah otonominya dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi, yaitu penerimaan pendapatan asli daerah, transfer dana perimbangan dan pengeluaran belanja modal.
 - c. Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan dokumentasi akademik yang dapat dijadikan acuan, referensi maupun rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang kinerja keuangan daerah dan faktor yang mempengaruhi.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang komparasi kinerja keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan analisis laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Wilayah Jawa, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kinerja keuangan daerah menggunakan indikator rasio kemandirian keuangan daerah.
- b. Pendapatan asli daerah menggunakan indikator pendapatan asli daerah.
- c. Dana perimbangan menggunakan indikator dana perimbangan.
- d. Belanja modal menggunakan indikator belanja modal.

2. Batasan Penelitian

Sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan penyimpangan dan pelebaran ruang lingkup penelitian, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan pada pemerintah provinsi yang berada di Wilayah Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- b. Data penelitian menggunakan laporan realisasi anggaran untuk periode 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2013 – 2022.
- c. Penelitian menggunakan variabel bebas yang terdiri dari pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2) dan belanja modal (X_3) serta variabel terikat kinerja keuangan daerah (Y).

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah memberikan penjelasan singkat dari istilah penting dalam penelitian dan akan dijabarkan dalam definisi konseptual dan operasional.

1. Definisi Konseptual

- a. Kinerja keuangan daerah diartikan sebagai analisa keuangan organisasi sektor publik, terutama pada pemerintah daerah dalam melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan urusan otonomi daerahnya yang ditinjau dari aspek *finansial* berdasarkan pada laporan keuangan pemerintah daerah.¹⁷
- b. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil gali potensi wilayah daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸
- c. Dana perimbangan atau yang sering disebut dana transfer didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pemerintah lain, dari pemerintah di atasnya atau pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah terkait untuk membantu pelaksanaan urusan daerah otonomnya dan diakui sebagai pendapatan daerah.¹⁹
- d. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk tujuan kepentingan publik yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.²⁰

¹⁷ Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara...*, hlm. 32 – 33

¹⁸ Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah Daerah...*, hlm. 44

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45

²⁰ *Ibid.*, hlm. 63

- e. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun sebagai sarana penyedia informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan berkaitan dengan kondisi pemerintah, kinerja keuangan dan transaksi selama satu periode sebagai bahan penilaian, evaluasi dan pertanggungjawaban.²¹
- f. Provinsi di Wilayah Jawa merupakan wilayah administratif di Wilayah Jawa dan sekaligus berperan sebagai daerah otonom yang dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.²²

2. Definisi Operasional

Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola keuangan mereka agar dana yang diterima dari pusat dapat digunakan secara efektif di samping menggali sumber kekayaan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah itu sendiri. Keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD ditetapkan berbeda untuk setiap daerah, sehingga pengelolaannya juga berbeda, beserta dengan evaluasi kinerja keuangan yang pasti berbeda. Dilakukan komparasi kinerja keuangan daerah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah provinsi di wilayah Jawa dalam menggunakan dana negara dan kekayaan daerah untuk membiayai seluruh penyelenggaraan otonomi daerah serta menguji faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah berdasarkan analisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

²¹ Alexander Anggono, *Akuntansi Manajemen pada Entitas Publik*, (Indramayu: Adab, 2021), hlm. 192

²² *Peraturan Pemerintah Republik...*, hlm. 13

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai upaya mempermudah penyusunan skripsi, penggambaran alur pembahasan dalam skripsi dan pemahaman inti penelitian yang dibahas dalam skripsi, maka disusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan penguji, lembar motto peneliti, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Menyajikan inti dari penelitian atau penulisan skripsi yang akan disusun ke dalam 6 bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menunjukkan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Teori

Bab ini membahas tentang *grand theory* penelitian, yaitu akuntansi sektor publik dan *applied theory* tentang kinerja keuangan daerah dan faktor yang mempengaruhi yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Teori yang dipaparkan berupa teori pendukung yang

diambil dari pernyataan para ahli atau pihak yang menguasai teori tersebut beserta penelitian terdahulu. Pada bab ini juga disusun kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian

Bab ini menunjukkan metode penelitian yang digunakan, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan uraian tentang subjek penelitian, temuan penelitian dan hasil analisis data dari berbagai uji.

BAB V Pembahasan

Bab ini menyajikan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dengan maksud menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dan mengaitkannya dengan teori yang relevan dan penelitian terdahulu.

BAB VI Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang membangun penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran penelitian, seperti tabulasi data penelitian, hasil analisis data, kartu kendali bimbingan, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.